



WATANG LIPU LA PALLOGE DALAM MENENTANG IMPERIALISME BELANDA DI KERAJAAN SOPPENG (1905-1906)

(Watang Lipu La Palloge Against Dutch Imperialism in Soppeng Kingdom 1905-1906)

Rahmatullah
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Makassar
Rahmatullah2274@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (i) Sejarah perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap imperialisme Belanda di Kerajaan Soppeng; (ii) Proses perlawanan Watang Lipu La Palloge ; (iii) Akhir perlawanan Watang Lipu La Palloge; (iv) Dampak yang ditimbulkan dari perlawanan Watang Lipu La Palloge di Kerajaan Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan penggambaran tentang kondisi yang ada dilapangan. Untuk teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan, teknik dokumentasi, teknik simak, teknik catat, dan teknik wawancara yang terkait dengan Watang Lipu La Palloge

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap kedatangan Belanda di Kerajaan Soppeng didasari pada nilai *siri' na pesse* yang tertanam kuat pada diri La Palloge yang tidak sudi raja dan daerahnya dikuasai oleh bangsa lain; (ii) Dengan alasan ini, maka Watang Lipu La Palloge melancarkan perang dengan taktik gerilya di berbagai tempat dalam wilayah Kerajaan Soppeng yang menghilangkan banyak nyawa di kedua belah pihak; (iii) Perlawanan Watang Lipu La Palloge berakhir dengan gencatan senjata antara pihak Belanda dan Watang Lipu La Palloge; (iv)Perlawanan yang dilancarkan pasukan Watang Lipu La Palloge berdampak pada dibatalkannya *korte verklaring* yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng serta menyebabkan gejolak yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kerajaan Soppeng sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Kata Kunci: Watang Lipu, La Palloge, Imperialisme Belanda, Kerajaan Soppeng, *korte verklaring*

Absract

The study aims at describing (i) History of the resistance of Watang Lipu La Palloge on dutch imperialism in Soppeng kingdom; (ii) The process of the resistance of Watang Lipu La Palloge; (iii) The end of the resistance of Watang Lipu La Palloge; (iv) The impact of the resistance of Watang Lipu La Palloge in Soppeng Kingdom. The study employed descriptive qualitative research method by providing description on the conditions at the field. Data were collected by employing study of literature, documentation, listening, note taking, and interview technique which related to Watang Lipu La Palloge.

The results of the study reveal that (i) The resistance of Watang Lipu La Palloge on Dutch presence was based on *siri' na pesse* values that strongly possessed by La Palloge who unwilling if the King and his territory was occupied by other nation; (ii) From this reason, Watang Lipu La Palloge waging war with guerillas tactics on some places of Soppeng Kingdom's, which eliminates many lives on both sides; (iii) The resistance of Watang Lipu La Palloge ended with a caesefire between the Dutch and Watang Lipu La Palloge; (iv) The resistance of Watang Lipu La Palloge's impact cancelled of *korte verklaring* previously signed by Sitti Zaenab as a queen of Soppeng Kingdom's. So that, it has an impact on the implementation of the planned policy by the Dutch Indies Government.

Keywords: Watang Lipu, La Palloge, Dutch Imperialism, Soppeng Kingdom, *Korte Verklaring*

PENDAHULUAN

Kolonialisme dan imperialisme Barat di wilayah Nusantara pada hakikatnya merupakan bentuk penjajahan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Tujuan awal dari penjajahan tersebut adalah untuk mencari komoditi rempah-rempah yang laku dipasaran Eropa pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit penguasaan terhadap wilayah Nusantara terus diperluas dan membentuk pemerintahan sendiri yang di mana para raja-raja di Nusantara harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah penjajahan.

Pada awal abad ke-20 Belanda giat memperluas wilayah kekuasaannya di Indonesia. Usaha perluasan kekuasaan tersebut terutama ditujukan kepada daerah-daerah di luar Jawa. Tujuan perluasan kekuasaan Belanda itu meliputi tiga hal:

- a. Menciptakan keamanan untuk menjamin berhasilnya usaha penanaman modal swasta Belanda dan modal asing lainnya di Indonesia.
- b. Menguasai tanah yang potensial untuk usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan dalam rangka usaha penanaman modal swasta di Indonesia
- c. Mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya, di

kerajaan-kerajaan di luar Jawa (Abduh. 1985: 96).

Daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah strategis bagi pelayaran dikarenakan daerah tersebut merupakan persimpangan jalur pelayaran Laut Jawa – Laut Flores – Selat Makassar – Laut Banda (Kepulauan Maluku) (Abduh. 1985: 1). Sepanjang pendudukan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, daerah ini tidak lepas dari gejolak pergolakan baik yang terjadi di darat maupun di lautan. Pergolakan tersebut umumnya dilakukan oleh para bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka sampai pada perlawanan rakyat kecil sekalipun (Poelinggomang. 2004: 57). Untuk itu, pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda menargetkan penguasaan secara penuh untuk wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini untuk menjaga wilayah Sulawesi Selatan dari intervensi negara lain yang juga pada saat itu giat-giatnya untuk melakukan invasi ke daerah yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam surat Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cornelis Alexander Kroesen tertanggal 14 Juli 1905 diperintahkan dengan tegas untuk melakukan tindakan penaklukan dan penguasaan langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memaksa semua penguasa lokal untuk mengakui kekuasaan pemerintah Hindia

Belanda dengan menandatangani “pernyataan pendek” (*korte verklaring*) (Poelinggomang, 2004:16). Sebagai realisasi atas kebijakan Van Heutsz, maka dikirimlah pasukan ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih berdaulat. Usaha tersebut mendapat penentangan dari raja-raja di Sulawesi Selatan sehingga terjadi peperangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Target pertama dari ekspedisi militer ini adalah Kerajaan Bone yang pada saat itu dipimpin oleh La Pawawoi Kareng Segeri. Hal ini dikarenakan Kerajaan Bone merupakan kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan pada masa itu. hal lain yang menjadi pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda adalah karena La Pawawoi yang seharusnya menjadi anak emas Pemerintah Hindia Belanda mulai menentang permintaan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pada saat ekspedisi militer Belanda masuk ke wilayah Kerajaan Soppeng, Datu Soppeng Sitti Zaenab kemudian menerima dengan baik kedatangan Belanda di Kerajaan Soppeng dan mengadakan pertemuan dengan Belanda. Dalam pertemuan tersebut, Datu Soppeng Zitti Zaenab lalu menanda tangani pernyataan pendek yang telah disodorkan oleh Belanda. Penanda tangan tersebut menandai beralihnya kekuasaan Datu

Soppeng kepada kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Soppeng.

Peralihan kekuasaan tersebut mendapat tanggapan kontra dari kalangan prajurit-prajurit Kerajaan Soppeng dan beberapa kalangan bangsawan lainnya terkhusus La Palloge sebagai Panglima Perang/ Menteri Pertahanan Kerajaan Soppeng. Ketidakpuasan tersebut membuat La Palloge beserta rakyat Soppeng melakukan perlawanan terhadap pendudukan Belanda di Soppeng. Hal ini bisa dikatakan bahwa terjadi perbedaan antara Panglima Kerajaan dan Datu Soppeng saat itu. Tidak seperti kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh rajanya, di Wilayah Soppeng perlawanan hanya dipimpin oleh pembesar-pembesar kerajaan khususnya La Palloge.

Memperhatikan permasalahan di atas, menarik untuk mengkaji sejarah perlawanan Watang Lipu La Palloge dalam menentang pendudukan Belanda di Kerajaan Soppeng. Terlebih lagi, sebagai tokoh penentang pendudukan Belanda di Kerajaan Soppeng, masih banyak masyarakat di daerah Kabupaten Soppeng saat ini yang hanya mengenal tentang La Palloge sebagai seorang bangsawan di Kerajaan Soppeng namun tidak mengetahui sepak terjang dari La Palloge sebagai seorang pencetus perlawanan

terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Kerajaan Soppeng tahun 1905.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang sebelumnya adalah sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Soppeng dan menjadi tempat berkedudukannya La Palloge sebagai *Watang Lipu* (Panglima Perang/Menteri Pertahanan) dan juga sebagai tempat terjadinya perlawanan antara pasukan La Palloge dan pasukan ekspedisi militer Belanda. Penelitian sejarah yang digunakan adalah yang bersifat deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis atau menggunakan bahan dokumen.

Secara teoretis, dalam penelitian sejarah dilakukan melalui empat tahapan metode penelitian yakni: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. *Heuristik* merupakan langkah awal sebagai sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau *evidensi* sejarah (Sjamsuddin. 2007:86). Pengumpulan sumber sejarah dengan metode kajian kepustakaan, penulis melakukan dengan cara mengkaji beberapa sumber yang terkait tentang Watang Lipu La Palloge yakni pengumpulan data atau

fakta-fakta sejarah dengan cara mengkaji dan menelaah karya tulis, buku, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh pada tahap heuristik tidak langsung diolah menjadi tulisan, melainkan dilakukan kritik terhadap sumber terlebih dahulu. Dalam tahap ini peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang digunakan yakni buku-buku dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pada dasarnya kritik sumber bertujuan untuk menilai otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi).

Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap sumber yang telah melalui tahap kritik. Pada tahap ini pula dituntut kecermatan dan sikap objektivitas yang harus dimiliki oleh penulis untuk dapat menafsirkan data-data terkait dengan perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap pendudukan Belanda di Kerajaan Soppeng.

Setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Pada tahap historiografi ini merupakan puncak dari segala tahap penulisan sejarah secara menyeluruh. Penulisan disusun dengan sistematis penulisan karya ilmiah dan

menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.

A. Latar Belakang Perlawanan

Watang Lipu La Palloge

Kawasan wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di bagian timur Indonesia merupakan kawasan yang potensial untuk usaha penanaman modal, baik di bidang pertanian dan perkebunan serta lingkungan alam lainnya juga tidak terlepas dari usaha perluasan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda yang dicanangkan. Namun rencana perluasan kekuasaan Belanda ini di berbagai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari beberapa raja dan bangsawan kerajaan masa itu.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz (1904-1909) di Hindia, dilakukan perluasan kekuasaan secara besar-besaran di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di Sulawesi Selatan. Guna merealisasi rencana perluasan kekuasaan di kawasan Sulawesi Selatan itu, Pemerintah Hindia Belanda di Batavia segera mempersiapkan tentara untuk melakukan ekspedisi militer. Kerajaan Bone dijadikan sebagai sasaran utama oleh Belanda karena dianggap sebagai suatu kerajaan yang paling kuat, berbahaya, dan paling berpengaruh di antara berbagai

kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada masa itu (Rasyid. 2007: 53).

Setelah menaklukan Bone yang ditandai dengan jatuhnya ibukota Kerajaan yaitu Watampone pada tanggal 30 Juli 1905, kegiatan pasukan ekspedisi militer Belanda selanjutnya adalah menyasar kepada kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan untuk kemudian menandatangani *korte verklaring*. Di Watampone, tiga kompi pasukan Belanda ditinggalkan sebagai tanda pendudukan dan diangkat Mayor Komandan sebagai penguasa sipil Bone pada tanggal 21 Oktober 1905 (Kol. Verslag. 1906).

Pada tanggal 24 September 1905, Panglima bersama pasukan berkekuatan 2 kompi infanteri, 2 peleton kavaleri, dan 150 ekor kuda beban bergerak menuju Watansoppeng (Sophiaan. 1996: 108). Pada tanggal 25 September 1905, Kolonel C.A Van Leonen sebagai Panglima Belanda dari Ekspedisi Sulawesi Selatan tiba di Watan Soppeng (Nonci. 2003: 305). dalam perjalanannya menuju ke Kerajaan Soppeng, pasukan ekspedisi militer Belanda tidak menghadapi hadangan yang berarti. Bahkan di depan kediaman Datu Soppeng dikibarkan Bendera Belanda (Sophiaan. 1996: 108). hal ini menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Ekspedisi Militer Belanda ke Soppeng disambut baik oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng.

Pada saat Belanda telah berada di Kerajaan Soppeng, C.A Van Leonen bermaksud untuk bertemu dengan Datu Soppeng yang pada saat itu dijabat oleh We Tenriwatu Sitti Zaenab Arung Lapajung Datu Soppeng XXXV. Oleh karena Datu dalam keadaan kurang sehat, maka pertemuan politik dilakukan dengan Arung Bila beserta tiga orang Pabbicara bersama anggota Hadat (Sophiaan. 1996: 108).

Pada tanggal 28 September 1905, diadakan pertemuan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Datu Soppeng dan para pembesar-pembesar kerajaan Soppeng lainnya di kediaman Datu Soppeng Sitti Zaenab. Dalam pertemuan yang dilakukan tersebut, menghasilkan sebuah kesepakatan antara pihak Pemerintah Hindia Belanda dan pihak Pemerintah Kerajaan Soppeng dengan ditandatanganinya *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek) yang sebelumnya juga telah ditandatangani oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai tanda pengakuan Raja Bone atas kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Bone. Adapun isi dari pernyataan pendek itu berupa ikrar yang pada intinya berbunyi bahwa:

1. wilayah raja yang dikalahkan dengan senang hati dimasukkan dalam bagian dari wilayah Hindia Belanda,

2. tidak akan membicarakan dalam perundingan “sikap terjang” Pemerintah Hindia Belanda kepada pihak asing (Inggris, Jerman, Portugal dan lainnya) dan menyembunyikan hal ikhwal itu, serta
3. akan menuruti semua keinginan Pemerintah Hindia Belanda. (W. J. Lucardie. 1912: 117).

Pembesar Kerajaan yang tidak senang dengan pertemuan tersebut, kemudian tidak menghadirinya. Beberapa pembesar Kerajaan Soppeng yang tidak menghadiri pertemuan diantaranya, Baso Balusu Sulle Datu Soppeng (Wakil Datu Soppeng), Watang Lipu La Palloge (Panglima Angkatan Perang Kerajaan Soppeng), La Mappe Datu Marioriawa, dan beberapa orang raja bawahan lainnya (Nonci. 2003: 305). Penolakan beberapa pembesar Kerajaan Soppeng disebabkan karena isi dalam *korte verklaring* yang bermaksud untuk merebut kedaulatan Kerajaan Soppeng. hal ini nampak pada poin pertama dan ketiga dimana Pemerintah Hindia Belanda menginginkan kontrol penuh terhadap Kerajaan Soppeng. Penolakan pembesar-pembesar tersebut menyebabkan dibatalkannya pernyataan pendek yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng (*Indisch Militair Tijdschrift*. 1915: 105). Dimana pada tanggal 20

Februari 1906 dilakukan lagi penandatanganan *korte verklaring* oleh Sitti Zaenab bersama dengan pembesar Kerajaan Soppeng (Amiruddin. 1991: 194).

Hal lain yang menjadi dasar penolakan Watang Lipu La Palloge bahwa adanya kontrak politik dengan beberapa kewajiban dari Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Soppeng diantaranya:

1. Pemerintah Kerajaan Soppeng diwajibkan membayar ongkos perang sebesar f75.000.
2. Rencana-rencana Gubernemen Hindia Belanda tentang pemungutan pajak-pajak, pembuatan jalan-jalan raya, penghapusan perbudakan dan sebagainya, larangan pemakaian senjata tajam di tempat umum dan pengumpulan senjata-senjata api (Indisch Militair Tijdschrift. 1915: 105).

Sikap pembesar yang tidak menghadiri pertemuan karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kerajaan Soppeng dimana Kerajaan Soppeng harus membayar denda sebesar f 75.000 dan diwajibkan membayar pajak kepada Belanda. Menjadi sebuah tamparan bagi Kerajaan Soppeng apabila membayar pajak di tanahnya sendiri. Dimana Belanda merupakan bangsa “pendatang” tidak memiliki hak untuk memberikan denda dan menarik pajak. Demikian

Representasi dari sikap La Palloge yang menolak pernyataan pendek dan kontrak politik antara Kerajaan Soppeng dengan Belanda. Pembatalan *korte verklaring* bukan berarti bahwa Kerajaan Soppeng memiliki kebebasan terhadap negerinya. Kontrol masih tetap berada di tangan Pemerintah Hindia Belanda dengan kontrak politik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak hadirnya beberapa pembesar Kerajaan Soppeng membuat C.A Van Leonen Panglima Ekspedisi memerintahkan Mayor Hildering untuk mencari orang tersebut yakni Baso Balusu Sulle Datu Soppeng dan Watang Lipu La Palloge. Sulle Datu yang ditemui oleh Hildering di Lampoko merespon kedatangan utusan Panglima itu dengan mengatakan bahwa terlambat bagi pasukan Ekspedisi belanda untuk menangkapnya (Sophiiian. 1996: 109). Dari pertemuan itu dan beberapa berita dari Soppeng menunjukkan bahwa Sulle Datu bersama Watang Lipu dan La Mappedatu Marioriawa adalah para pembesar yang menentang Belanda.

Kontrak politik dan beberapa kewajiban lainnya yang menjadi tuntutan pihak Pemerintah Hindia Belanda kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng. Penandatanganan kontrak politik yang dilakukan Sitti Zaenab Datu Soppeng

merupakan genderang awal pengakuan Kerajaan Soppeng terhadap kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda untuk dapat mengatur Kerajaan Soppeng sesuai kehendak Pemerintah Hindia Belanda. Meski *korte verklaring* dibatalkan sebagai dampak dari perlawanan Watang Lipu La Palloge dan para pembesar Kerajaan Soppeng lainnya karena geram dengan sikap Belanda yang ingin menarik pajak dan pemberian denda. Maka terjadilah perlawanan La Palloge terhadap Belanda yang berdampak pada pembatalan *korte verklaring*.

La Palloge melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda bukan karena faktor ekonomi. Artinya, La Palloge melakukan perlawanan bukan karena Belanda ingin menguasai sumber daya di Soppeng. Di mana pada periode ini, Soppeng tidak memiliki komoditas yang menguntungkan bagi Belanda (Terjemahan Memori Serah Terima Jabatan 1927. 2004: 3). Berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Lima Ajatappareng yang merupakan salah satu wilayah penghasil beras terbesar di Sulawesi pada masa itu (Abduh. 1985: 126).

Perlawanan La Palloge terhadap pemerintah Hindia Belanda didasari pada ketidak inginan kekuasaan di wilayah Kerajaan Soppeng yang dijabat oleh Pemerintah Kerajaan Soppeng beralih kepada Pemerintah Hindia Belanda. Ini

tentang wibawa kerajaan. La Palloge tidak sudi Kerajaan yang selama beratus-ratus tahun diperintah oleh para keturunan La Temmamala Manurungnge ri Sekkanyili dinodai dengan maksud pemerintah Hindia Belanda yang ingin menguasai wilayah Kerajaan Soppeng dengan segala kebijakan-kebijakannya.

Isi kontrak politik yang menyatakan bahwa Kerajaan Soppeng akan menuruti semua keinginan pemerintah Hindia Belanda menjadikan Pemerintah Kerajaan Soppeng serta rakyat Soppeng menjadi orang lain di negeri sendiri. Hal inilah yang tidak disenangi oleh La Palloge sebagai Panglima Kerajaan Soppeng yang tak sudi Sitti Zaenab yang merupakan rajanya diperintah oleh orang asing.

Sikap penentangan Watang Lipu La Palloge kepada pemerintah Hindia Belanda menggambarkan nilai *siri' na pesse* yang merupakan pandangan hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. *Siri'* arti kulturalnya adalah malu, yang erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan dan harga diri sebagai manusia yang utuh (Zid dan Sofjan. 2009: 6). Menurut Abdullah, *Siri'* bukanlah sekedar perasaan malu, tetapi menyangkut masalah yang paling peka yang merupakan jiwa dan semangat dalam diri mereka, menyangkut faktor martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan,

yang kesemuanya harus dipelihara dan ditegakkan (Abdullah dalam Syarif, dkk. 2014: 4). La Palloge yang sejak lahir hidup dan mengabdikan untuk Kerajaan Soppeng tidak sudi harga dirinya dinjak-injak oleh orang asing yang ingin menguasai dan memerintah di Kerajaan Soppeng yang sangat dia cintai. Sedangkan *'pesse* dalam arti kultural adalah rasa belas kasihan, kepedihan, turut merasakan nestapa dan berhasrat membantu karena adanya hubungan rasa (Zid dan Sofjan. 2009: 7). La Palloge yang merupakan bawahan dari Sitti Zaenab Datu Soppeng, tidak tega raja yang sangat dihargainya diperintah oleh Orang Belanda. Dengan kata lain, *siri' na pesse* yang menjadi pandangan hidup orang Bugis termasuk La Palloge bukan hanya tentang perlawanan dirinya sebagai seorang individu terhadap Belanda tetapi juga tentang Kerajaan Soppeng tempatnya hidup dan mengabdikan diri.

Pernyataan pendek serta kontrak politik yang ditandatangani oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng merupakan tindakan yang dilakukan secara terpaksa namun telah dipertimbangkan secara matang oleh Datu Soppeng dikarenakan keterbatasan persenjataan dan pasukan yang dimiliki oleh Kerajaan Soppeng. Hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa penentangan terhadap Belanda hanya akan memakan banyak korban masyarakat Soppeng karena dibanding dengan Kerajaan Bone

yang lebih lengkap persenjataan dan pasukannya, Kerajaan Soppeng tidak memiliki lebih dari Kerajaan Bone yang sebelumnya juga hancur lebur melawan serangan pasukan Ekspedisi Militer Belanda.

Penyambutan masyarakat Soppeng secara damai dan pengibaran bendera Belanda di depan kediaman Datu Soppeng hanyalah sebuah upaya diplomasi Sitti Zaenab Datu Soppeng guna mengantisipasi tindakan represif militer Belanda atas masyarakat dan wilayah Kerajaan Soppeng. Oleh karena itu, terkhusus Kerajaan Soppeng, pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu memfokuskan pada tindakan militer untuk menaklukkan Kerajaan Soppeng. Selain itu, Tindakan Sitti Zaenab Datu Soppeng merupakan tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kerajaan Soppeng. Pertempuran dengan pasukan militer Belanda hanya akan mengakibatkan pertumpahan darah dan kerugian besar di pihak Kerajaan Soppeng. Hal ini yang tidak diinginkan oleh Datu Soppeng akan jatuhnya banyak korban di pihak masyarakat Soppeng sendiri.

Oleh karenanya, ketika Sitti Zaenab mengetahui bahwa La Palloge melakukan perlawanan terhadap kedatangan Belanda, Sitti Zaenab hanya mengingatkan La Palloge untuk senantiasa berhati-hati dan tetap mendukung

perjuangan La Palloge dari belakang layar. Dalam artian, Sitti Zaenab tidak serta merta lepas tangan sebagai raja terhadap perlawanan La Palloge. Berdasarkan pernyataan Sitti Zaenab kepada Pemerintah Hindia-Belanda yakni: *Bahwa saya hanya bisa menjamin keselamatan Tuan, hanya bila Watang Lipu selaku Menteri Pertahanan/ Panglima Perang Kerajaan Soppeng menyetujui atau memilih damai daripada perang, sebagaimana Tuan menjamin pula keselamatan saya* (Rasyid. 2007: 60). Pernyataan Sitti Zaenab sebagai Datu Soppeng tidak menunjukkan legitimasinya sebagai raja karena dalam kondisi tersebut Sitti Zaenab tidak bisa memutuskan sikap untuk menghentikan Perlawanan La Palloge. Justru kondisi ini dipegang penuh oleh La Palloge sebagai Panglima Perang.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam Perjuangan La Palloge terdapat nilai *siri'* yang kuat. Hal inilah yang kemudian dirasakan oleh Sitti Zaenab sebagai Raja dan pada akhirnya enggan untuk menghentikan perlawanan La Palloge. Secara struktural kedudukan La Palloge berada dibawah Raja namun Sitti Zaenab meski telah melakukan peringatan terhadap La Palloge, perlawanannya tetap berlangsung. Sikap Sitti Zaenab dan hasilnya terhadap perlawanan La Palloge, menunjukkan bahwa Posisi Patron-Klien tidak nampak.

Bahwa nilai *siri'* telah mengaburkan posisi tersebut. Benar bahwa Sitti Zaenab adalah Raja namun ia tidak punya kuasa penuh atas perlawanan La Palloge karena Sitti Zaenab memahami bahwa gerakan La Palloge adalah gerakan yang didasari oleh nilai *siri'*.

Selain itu, menurut Casutto, *siri'* merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat. (Mattulada. 1985: 62) nilai ini pada dasarnya berpengaruh pada masyarakat adat sendiri. Tetapi dalam kasus perlawanan La Palloge, pihak yang melanggar adat adalah Pemerintah Hindia Belanda. Pelanggaran atas nilai adat oleh pihak Belanda yakni menciderai kehormatan Sitti Zaenab dan masyarakat Soppeng Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Artinya *siri'* melewati ruang yang sebelumnya terkonstruksi dalam masyarakat Bugis itu sendiri. Posisi Belanda sebagai pelanggar nilai *siri'* wajib diberikan hukuman atas tindakannya dan yang menjadi eksekutor adalah La Palloge.

B. Proses Perlawanan Watang Lipu La Palloge

Kebijaksanaan J.B Van Heutsz sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mengadakan perluasan kekuasaan khususnya di Sulawesi Selatan, membuat para raja-raja dan bangsawan kerajaan khawatir akan diambil alihnya tugas dan

wewenang raja sebagai pengatur pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Di Kerajaan Soppeng, terjadi perbedaan sikap antara Datu Soppeng dan Watang Lipu La Palloge dan beberapa pembesar kerajaan lainnya. Sitti Zaenab Datu Soppeng yang mengadakan pertemuan dengan C.A Van Leonen Panglima Ekspedisi militer Belanda bersikap untuk menandatangani *korte verklaring serta* kewajiban kontrak lainnya sebagai pengakuan atas kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Soppeng. Di lain pihak, La Palloge yang menduduki jabatan Panglima Perang, menolak adanya pertemuan termasuk hasil pertemuan tersebut. Sikap La Palloge itu didukung oleh beberapa pembesar Kerajaan Soppeng yang lain.

Ada tiga orang pembesar Kerajaan Soppeng yang menjadi tokoh dalam penentangan kedatangan pasukan ekspedisi militer Belanda di Kerajaan Soppeng, diantaranya La Palloge Watang Lipu, Sulle Datu Baso Balusu, dan La Mappedatu Marioriawa. (Kolonial Verslag 1906). Dalam proses perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap keberadaan Belanda di Soppeng, pasukan perang Kerajaan Soppeng yang disebut Watang LipuE masih belum diketahui secara rinci struktur dan bentuk organisasinya. Sesuai struktur dalam pemerintahan Kerajaan Soppeng, pasukan

Watang LipuE memang ada dan terorganisir namun tidak diketahui secara pasti jumlah prajuritnya.

Dalam menghadapi pasukan militer Belanda, sistem perlawanan yang digunakan oleh La Palloge adalah Strategi dan taktik perang gerilya. Serangan gerilya yang dijalankan memiliki tujuan agar memecah konsentrasi pasukan militer Belanda yang akhirnya memusatkan kekuatan pada pos-pos kecil. Selain itu, strategi perang gerilya lebih menguntungkan pihak La Palloge dikarenakan pasukan La Palloge lebih mengetahui kondisi dan medan pertempuran di wilayah Kerajaan Soppeng. Oleh karena itu, selain pasukan yang dipimpin langsung oleh La Palloge, La Palloge juga menunjuk pemimpin-pemimpin pasukan dan memerintahkan untuk berpencar ke tempat-tempat strategis di wilayah pegunungan dan hutan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi daya serang pasukan militer Belanda yang memiliki pasukan yang terlatih dan keunggulan dalam peralatan perang. Dengan taktik perang gerilya maka medan perang akan menjadi meluas dan menguntungkan pasukan La Palloge yang lebih menguasai keadaan dan kondisi alam.

Perlawanan Watang Lipu La Palloge dimulai ketika kepergian sebagian besar pasukan ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Panglima pasukan

ekspedisi militer C.A Van Leonen yang kemudian menuju Pampanua (Sophiaan. 1996: 107). Hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pasukan Watang LipuE dengan menunggu sampai berkurangnya jumlah pasukan ekspedisi militer Belanda yang berdiam di wilayah Soppeng. Dengan berkurangnya jumlah pasukan Belanda, maka pemberontakan pun mulai dilakukan.

Setelah mendengar laporan bahwa terjadi gejolak di Kerajaan Soppeng, maka pada awal bulan Oktober 1905 Belanda segera pemerintah Hindia mengirim Kapten Kooy dari Wajo ke Soppeng dan dari sana mempersatukan operasi di bawah komando kapten Kooy (Sophiaan. 1996: 110). Kapten Kooy kemudian bergerak mengadakan operasi di daerah Balusu dan sekitarnya. Operasi yang dilakukan tersebut kemudian mempertemukan antara pasukan perang Kerajaan Soppeng yang dipimpin oleh Baso Balusu Sulle Datu Soppeng dan pasukan ekspedisi Belanda yang berujung pertempuran di Lappa Parese. Serangan yang berlangsung selama 3 hari 3 malam oleh pasukan Belanda itu tidak berhasil menembus pertahanan yang dibentuk oleh pasukan Baso Balusu yang mengandalkan senjata yang bernama La Bolong Ringgi (Nonci. 2003: 308). Oleh karena itu, pasukan militer Belanda kemudian mundur untuk menyusun ulang strategi perang.

Setelah berlalu beberapa minggu, pada bulan November 1905 diadakan operasi lanjutan di bawah pimpinan Kapten Kooy dengan membawa 1 kompi pasukan dari makassar (Kol.Verslag 1906). Operasi dijalankan dari arah timur melalui Lapajung untuk mencari Watang Lipu La Palloge. Sesampainya pada suatu tempat diantara Galung LangiE dan Lawo, pasukan militer Belanda dihadang oleh pasukan Watang LipuE di bawah pimpinan Jangko Bauna yang menyebabkan terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Pertempuran berjalan tidak seimbang dikarenakan persenjataan yang dimiliki pasukan Jangko Bauna tidak sebanding dengan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Pertempuran itu mengakibatkan Jangko Bauna gugur dalam medan perang (Rasyid. 2007: 68) Operasi pun dilanjutkan menuju markas Watang Lipue di Saring.

Perjalanan pasukan ekspedisi militer Belanda dilakukan melalui jalur Kampung Lesu, Pesse, Galung Langie dan akhirnya sampai pada suatu tempat di daerah pegunungan, yaitu Salalong pada tanggal 5 November 1905. Sesampainya di Salalong, terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan militer Belanda dengan pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng di Bawah pimpinan La Palloge. La Palloge didampingi oleh dua orang

kepercayaannya yaitu La Ussu Matoa Rumpia sebagai *panni ataunna* (komandan sayap kanan) dan La Baloci sebagai *panni abeona* (komandan sayap kiri) (Rasyid. 2007: 69). Dalam pertempuran itu, orang-orang dari Sidenreng dan Barru turut membantu pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng melawan pasukan Belanda (Kol. Verslag 1906). Di tempat lain Bukit Salalong, perang berkecamuk antara pasukan Belanda dengan pasukan yang dipimpin La Mappedu Marioriawa.

Setelah beberapa hari pertempuran berlangsung, akhirnya La Palloge memerintahkan para pasukannya untuk mundur sampai ke Tanrajo. Mundurnya pasukan Watang LipuE tersebut dikarenakan banyaknya korban yang berjatuh dari pihak Soppeng dan juga dikarenakan tidak sebandingnya senjata yang dimiliki pasukan Belanda dan pasukan La Palloge. Pertempuran yang berlangsung dari tanggal 5-10 November 1905 itu telah menelan banyak konyak korban diantaranya 41 orang terbunuh dan 4 orang terluka di pihak La Palloge. Sementara itu, seorang pribumi tewas terbunuh dan 4 orang terluka dari pihak pasukan ekspedisi militer Belanda (Kolonial Verslag 1906: 9).

Setelah berada di Tanrajo dan mengambil posisi bertahan, pasukan La Palloge dengan semangat perjuangan yang

membara untuk mempertahankan negerinya dari penjajahan Belanda, melakukan perlawanan sengit dari serangan pasukan Belanda. Pertahanan yang kokoh dari pasukan La Palloge membuat serangan pihak Belanda tidak bisa menembusnya yang akhirnya membuat pasukan La Palloge berbalik menyerang dan pasukan Belanda mundur bertahan di puncak gunung yang bernama *Coppo Lalluru dan Coppo Lanca* sementara pasukan La Palloge mengambil kedudukan di pinggir sungai. Namun karena pertahanan yang mengesankan dari pasukan Belanda membuat pasukan La Palloge kesulitan di dalam penyerangannya sehingga mengundurkan diri sampai ke Wanua KeaE. Dalam peperangan di daerah ini menyebabkan 32 orang pasukan La Palloge gugur diantaranya La Ube Petta Ambona I Time dan La Boto dan banyak pula yang luka-luka. Selain itu, juga disita 20 pucuk senapan Beumont dari tangan pasukan La Palloge (Nonci. 2003: 311).

Mundurnya pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng ke Wanua KeaE, menyebabkan situasi dan keadaan ini dimanfaatkan oleh pasukan ekspedisi militer Belanda untuk segera mengadakan serangan ke daerah pertahanan pasukan La Palloge di Bulu Alipeng, Balusu pada tanggal 12 dan 13 November 1905 (Sophiaan. 1997: 110). di sinilah terjadi

pertempuran segit dan mati-matian antara pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng dan pasukan ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Kapten Kooy.

Dari penyerangan itu, pasukan ekspedisi militer Belanda berhasil merebut gudang mesiu pasukan La Palloge yang kemudian dibakar oleh pihak pasukan Belanda (Rasyid. 2007: 71). Hancurnya gudang mesiu di Bulu Alipeng menyebabkan para pasukan La Palloge sangat marah. Kemarahan para pasukan Soppeng dilampiaskan dengan menghadang pasukan ekspedisi militer Belanda yang berusaha menduduki pusat pertahanan pasukan Soppeng di Balusu.

Pertempuran yang terakhir ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat di antara pertempuran-pertempuran lain yang dialami oleh Watang Lipu La Palloge. Pertempuran ini mengakibatkan 100 pasukan gugur dan 150 pasukan luka-luka dari pihak pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng. Sementara itu, Belanda pun menderita banyak korban meninggal dan luka-luka akibat terdesak oleh pasukan La Palloge. (Sophiaan. 1997: 110) di sisi lain, pihak Belanda juga berhasil menyita beberapa buah meriam kecil dan 20 pucuk senapan Beumont serta patrum (tabung tembaga yang berisi mesiu dan peluru) sejumlah 20.000 buah. (Nonci. 2003: 312)

Melihat banyak pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng mengalami luka berat bahkan banyak yang meninggal, maka Watang Lipu La Palloge bersama dengan pasukannya yang tersisa terpaksa mundur dan bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Kapten Kooy juga terus melakukan pencarian menyusuri wilayah Soppeng, Sidenreng, dan Barru.

C. Akhir Perlawanan Watang Lipu La Palloge

Setelah pertempuran yang sangat dahsyat di wilayah Soppeng dan jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak baik itu pihak pasukan ekspedisi militer Belanda maupun pasukan angkatan perang Kerajaan Soppeng, maka pada tanggal 14 November Panglima ekspedisi militer Belanda C.A Van Leonen kembali ke Makassar karena pemerintah Hindia Belanda menganggap tugas pasukan ekspedisi militer Belanda untuk pendudukan telah selesai. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 6 tanggal 16 November 1905 yang menyatakan bahwa terhitung sejak 4 Desember 1905 dengan pembebasan Kolonel Van Leonen dari jabatannya sebagai panglima, maka komando dan staf umum dibubarkan (Kolonial Verslag 1906: 9).

Hal ini menandakan bahwa setelah penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Verklaring*) oleh para raja-raja dan pemberontakan yang mulai terpinggirkan dari pusat kekuasaan kerajaan, maka pemerintah Hindia Belanda membebas tugas Kolonel Van Leonen dari tugasnya sebagai panglima. Hal ini tidak berarti bahwa pendudukan dihentikan. Pendudukan oleh pasukan militer Belanda tetap dilakukan akan tetapi jumlah pasukan yang ditempatkan mulai dikurangi. Kapten Kooy masih tetap memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan La Palloge bersama dengan para pengikutnya yang masih bersembunyi.

Pada tanggal 10 Desember 1905 Kapten Kooy yang berada di Pare-Pare mendengar berita bahwa Watang Lipu La Palloge, Sulle Datu Baso Balusu, dan La Mappedatu Marioriawa bersembunyi di Palakka di atas puncak Umpungeng, daerah Soppeng bagian timur. Dalam pertengahan Desember 1905 Kapten Kooy bersama sebagian pasukannya menuju Watan Soppeng melalui Pare-Pare, Masepe, dan Batu-Batu (Nonci. 2003: 313).

Sesampainya di Watan Soppeng, Kapten Kooy tidak menggunakan tindakan militer untuk menangkap La Palloge melainkan dengan memerintahkan seorang yang bernama Ambo Salama untuk mengantarkan sebuah surat yang berisi

ajakan agar La Palloge turun dari persembunyiannya. Cara ini dilakukan oleh Kapten Kooy agar perlawanan La Palloge dapat diredam melalui diplomasi dan melihat medan tempat persembunyian La Palloge yang strategis karena berada di puncak Umpungeng.

Cara tersebut ternyata berhasil membujuk La Palloge. Namun La Palloge meminta 3 syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Belanda agar dia dapat keluar dari tempat persembunyiannya yang pada intinya berisi: diperbolehkan memakai senjata, begitu pula tetap diperbolehkan membawa pengawal, pengawal juga tetap diperbolehkan bersenjata (Rasyid. 1985: 26). Syarat yang diajukan oleh La Palloge tersebut diterima dan dikabulkan oleh Kapten Kooy selaku penguasa sipil dan militer di Soppeng. Perjanjian yang telah disepakati itu menandai gencatan senjata antara La Palloge dan pihak Belanda.

pada tanggal 20 Desember, Watang Lipu dan La Mappedatu Marioriawa melapor ke gubernur letnan sipil dan militer di Rappang. (*Indisch Militair Tijdschrift*, extra bijlage no. 35. 1915: 117). Watang Lipu La Palloge bersama La Mappedatu Marioriawa datang menyerahkan diri pada pemerintah Belanda terlebih dahulu dengan tidak mengikutkan Sulle Datu Soppeng Baso Balusu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sikap licik pemerintah Belanda yang pernah terjadi

pada La Panambong salah seorang pimpinan pasukan La Palloge yang ditangkap diam-diam setelah adanya gencata senjata. Oleh karena pemerintah Belanda menepati janjinya kepada La Palloge dengan bersikap baik kepada La Palloge saat menyerahkan diri, makapada tanggal 6 Januari 1906 Baso Balusu Sulle Datu Soppeng baru menyerahkan diri kepada Asisten Residen Bone

Adapun keputusan La Palloge untuk menghentikan perlawanannya bisa saja didasarkan atas pertimbangan untuk mengamankan sebagian pasukannya yang selamat. Berikutnya memberikan perlindungan penuh kepada pasukannya dari hukuman Pemerintah Kolonial Belanda. dalam artian bahwa “menyerah” yang dimaksud dalam catatan Belanda adalah menyerah bersyarat. Pemerintah Belanda tidak melakukan penangkapan La Palloge dan pasukannya menjadi dasar yang cukup kuat untuk menggambarkan adanya syarat yang diajukan oleh pihak La Palloge ke Pemerintah Belanda.

Jalannya diplomasi yang dipilih oleh kedua pihak diawali dengan melakukan gencatan senjata. Namun bukan berarti kedudukan La Palloge di Kerajaan Soppeng sebagai Watang Lipu/Panglima Angkatan Perang Kerajaan Soppeng lepas dari tangannya. Kedudukan La Palloge sebagai Watang Lipu lepas, ketika ia wafat pada tahun 1911. Ketika

gencatan senjata terjadi, status La Palloge sebagai Panglima di Kerajaan Soppeng tidak dihilangkan. Artinya, ada sebuah kesepakatan yang terjalin antara Sitti Zaenab dengan pemerintah pendudukan Belanda di Soppeng bahwa pada saat gencatan senjata, status La Palloge sebagai panglima kerajaan tetap dipertahankan dan keamanan atas semua pasukannya yang ikut dalam peperangan tetap terjaga oleh Belanda. Ini terbukti juga dengan tidak ditahannya La Pannambong yang merupakan salah satu kapten di pasukan La Palloge oleh pemerintah Belanda.

Berakhirnya perlawanan La Palloge menunjukkan adanya proses diplomasi antara Sitti Zaenab, La Palloge dan Pemerintah Hindia Belanda. La Palloge dinyatakan “menyerah” menjadi kurang tepat karena ia dan pasukannya sama sekali tidak ditahan maupun diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, dapat dikatakan bahwa La Palloge berhenti melakukan perlawanan karena adanya kesepakatan yang tercapai dalam proses diplomasi itu sendiri. Namun di sisi lain, Pemerintahan Hindia Belanda di Soppeng dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan yang signifikan seperti gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Watang Lipu La Palloge. Ini terbukti pula dengan adanya kesepakatan ulang tentang *korte verklaring* pada tanggal 20 Februari 1906 antara

Kerajaan Soppeng dan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng, Watang Lipu La Palloge, dan Pemerintah Hindia Belanda menemui titik terang.

D. DAMPAK PERLAWANAN

WATANG LIPU LA PALLOGE

Penentangan Watang Lipu La Palloge dan beberapa pembesar kerajaan lainnya terhadap pertemuan C.A van Leonen dan Kerajaan Soppeng pada tanggal 28 September 1905 menjadikan *korte verklaring* yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Sitti Zaenab Datu Soppeng kemudian dibatalkan sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda (Indisch Militair Tijdschrift. 1915: 105). Hal ini dilakukan Pemerintah Hindia Belanda karena menganggap bahwa Kerajaan Soppeng tidak bisa memenuhi tuntutan Belanda terhadap isi *korte verklaring* yang pada intinya Kerajaan Soppeng berada dalam kontrol kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Penentangan Watang Lipu La Palloge menandakan bahwa masih adanya sebagian pembesar yang tidak ingin menuruti keinginan Pemerintah Hindia Belanda. Pembahasan mengenai *korte verklaring* barulah disepakati ulang pada tanggal 20 Februari 1906 setelah perlawanan Watang Lipu La Palloge berakhir (Amiruddin. 1991: 194).

Sejak terjadinya Gencatan senjata antara Watang Lipu La Palloge dengan pemerintah pendudukan Belanda, maka secara praktis sudah tidak ada lagi perlawanan yang dilakukan secara massif dalam menentang pendudukan Belanda di Soppeng. Namun, tidak berarti bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda di Soppeng tidak ada lagi. Perlawanan masih tetap ada namun tidak sebesar perlawanan yang dilakukan dahulu oleh Watang Lipu La Palloge dan pasukannya. Perlawanan La Palloge beserta pasukannya yang berakhir pada awal 1906 menyebabkan lahirnya bibit-bibit perlawanan lain yang terjadi di berbagai daerah di wilayah Kerajaan Soppeng. Hal ini terjadi karena ketidaksenangan masyarakat Soppeng terhadap pemerintah Hindia Belanda di Soppeng.

Pada tanggal 30 April 1906, sebanyak 120 orang mencoba membunuh penguasa sipil Soppeng yang sedang dalam perjalanan bersama beberapa orang pimpinan. Namun, tindakan itu dapat diatasi oleh Belanda dengan menggerakkan satu patroli lengkap dan berhasil membunuh 40 orang dan 50 orang berhasil ditangkap (Kolonial Verslag 1906. 2004: 9). Perlawanan ini merupakan perlawanan yang cukup banyak namun tidak terorganisir dengan baik sehingga cepat diatasi oleh pasukan Belanda.

Perlawanan juga dilakukan oleh beberapa mantan pasukan La Palloge yang secara diam-diam melakukan pemberontakan, diantaranya La Panambong yang merupakan mantan kapten di pasukan Watang Lipu La Palloge. Gerakan perlawanan yang dilakukan La Panambong bersama pasukannya tidak lagi dilakukan secara massif melainkan menunggu kelengahan aparat Belanda lalu menyerang. Cara ini ia lakukan karena melihat situasi dan kondisi pasukan yang dimiliki yang semakin berkurang serta peralatan senjata yang tidak seimbang.

Berbagai perlawanan yang terjadi tersebut merupakan efek dari perlawanan sebelumnya yang dilakukan oleh Watang Lipu La Palloge. Gencatan senjata antara Watang Lipu La Palloge dengan Pemerintah Hindia Belanda tidak serta merta membuat pasukan Watang Lipu La Palloge menerima keputusan tersebut. Sisa-sisa pasukan Watang Lipu La Palloge yang tidak sudi bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan perjuangannya. Setelah La Palloge menghentikan perlawanan, semangat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda masih tetap ada di dalam diri rakyat Soppeng.

Keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah

Soppeng tidak lepas dari tujuan untuk menguasai akses darat yang menghubungkan wilayah-wilayah administratif Afdeling Bone. Soppeng yang berada di antara Bone dan *Ajatappareng* artinya akses dari Bone menuju Sidenreng sebagai penghasil komoditi beras dan Pare-Pare sebagai pelabuhan terbuka. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Pemerintah Hindia Belanda yang membangun jalan aspal dari Watan Soppeng ke perbatasan Sidenreng (Terjemahan Memori Serah Terima Jabatan di Soppeng 1927. 2004: 2). Hal tersebut kemudian menggambarkan bahwa Soppeng juga merupakan wilayah penting dan harus dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa perlawananan La Palloge, tidak disebutkan adanya perebutan atau untuk mempertahankan komoditi perdagangan. Namun setelah perlawanan La Palloge dan dikuasainya Soppeng, terjadi penataan wilayah ataupun penggabungan beberapa wilayah kecil. Hal ini juga berdampak pada penguasaan lahan yang pada saat itu berpotensi sebagai lahan untuk memproduksi komoditas perdagangan.

Sebelum kedatangan Belanda di Kerajaan Soppeng, memang tidak ada komoditi yang layak untuk diperdagangkan di daerah Soppeng. Penghasilan melimpah dari sumber daya

alam di Soppeng berawal dari inisiatif Pemerintah Hindia Belanda untuk menanam berbagai tanaman yang laku di pasaran contohnya pala dan aren seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, penguasaan wilayah Soppeng berdampak pada berkembangnya potensi lahan di wilayah Soppeng yang sebelumnya hanya berupa Hutan lebat kemudian oleh Belanda dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan komoditas ekspor bagi Pemerintah Hindia Belanda dan beberapa produksi-produksi lainnya dari alam Soppeng. Untuk itu, agar suplai barang Soppeng dapat berjalan dengan lancar ke daerah-daerah lainnya maka Pemerintah Hindia Belanda mulai melaksanakan kebijakan pembangunan fisik di Wilayah Soppeng dengan membangun jalan dan jembatan penghubung antara *afdeling* yang satu dan wilayah *afdeling* yang lainnya. Pembangunan fisik itu salah satunya pembangunan jalan aspal yang menghubungkan antara Watansoppeng dengan Sidenreng (Terjemahan Memori Serah Terima Jabatan di Soppeng 1927. 2004: 2). Dengan pembangunan jalan tersebut, maka lalu lintas perdagangan ke Sidenreng dan sekitarnya termasuk ke Pare-Pare dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian pemerintah Hindia Belanda di *Onderafdeeling* Soppeng.

Perlawanan yang dilakukan oleh La Palloge terhadap Pemerintahan Hindia Belanda di Soppeng membuat adanya kekhawatiran bagi Pemerintah Hindia Belanda. Hal itu disebabkan karena ketika masih terjadi gejolak keamanan di wilayah Kerajaan Soppeng maka kebijakan pembangunan fisik dan pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Hindia Belanda akan terhambat. Stabilitas keamanan akan mempengaruhi jalannya kebijakan serta roda perekonomian di wilayah Soppeng. Untuk itu, perlu ada tindakan dari Pemerintah Hindia Belanda untuk dapat memusnahkan pergerakan La Palloge beserta pasukannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penandatanganan *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek) serta kontrak politik tambahan oleh Sitti Zaenab membuat para pembesar Kerajaan Soppeng terutama Watang Lipu La Palloge menjadi geram. Ketidaksetiaan Watang Lipu La Palloge atas penguasaan Belanda di Kerajaan Soppeng membuat La Palloge menggerakkan pasukannya untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh La Palloge didasari pada nilai *siri' na pesse* yang tertanam kuat pada diri La Palloge. La

Palloge tidak sudi sebagai orang yang lahir dan mengabdikan untuk Kerajaan Soppeng kemudian dikuasai oleh orang asing (Belanda) dan tidak rela raja yang sangat diharganya diperintah oleh orang Belanda.

2. Perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap Imperialisme Belanda di Kerajaan Soppeng dilaksanakan dengan strategi dan taktik perang gerilya. Strategi dan taktik perang gerilya yang dijalankan memiliki tujuan agar memecah konsentrasi pasukan militer Belanda yang akhirnya memusatkan kekuatan pada pos-pos kecil. Selain itu, kemampuan persenjataan yang dimiliki Belanda lebih canggih daripada peralatan senjata milik pasukan La Palloge. Meskipun demikian, La Palloge memiliki keuntungan dalam hal penguasaan medan pertempuran sehingga strategi perang gerilya sangat cocok diterapkannya.
3. Setelah berbagai perang yang menghilangkan banyak nyawa dari kedua pihak, baik itu pasukan La Palloge maupun pasukan militer Belanda, Perlawanan Watang Lipu La Palloge diakhiri dengan adanya gencatan senjata antara La Palloge dengan pihak militer Belanda pada tanggal 20 Desember 1905. Keputusan La Palloge untuk menghentikan

perlawanannya didasarkan atas pertimbangan untuk mengamankan sebagian pasukannya yang selamat.

4. Perlawanan yang dilakukan oleh Watang Lipu La Palloge berdampak pada dibatalkannya *korte verklaring* yang ditandatangani Sitti Zaenab Datu Soppeng pada tanggal 28 September 1905. Perlawanan juga menyebabkan terjadinya gejolak yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Soppeng. Terganggunya stabilitas keamanan, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Hindia Belanda diantaranya pembangunan fisik/infrastruktur yang secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian pemerintah Hindia Belanda di Soppeng. berakhirnya perlawanan Watang Lipu La Palloge terhadap Belanda tidak berarti bahwa perlawanan di wilayah Kerajaan Soppeng sudah tidak ada lagi. Perlawanan masih tetap ada namun dalam jumlah yang tidak terlalu besar serta tidak terorganisir secara baik.

B. Saran

1. Semangat perjuangan Watang Lipu La Palloge dalam mempertahankan harga diri dan tanah airnya yang berlandaskan nilai *siri' na pesse*

merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada generasi-generasi penerus bangsa agar tak tergerus oleh perkembangan zaman.

2. Penulisan terhadap sejarah lokal Sulawesi Selatan khususnya di daerah Soppeng masih kurang maka dari itu diharapkan kepada para peneliti untuk lebih mengembangkannya lagi
3. Keterbukaan sumber data dalam penelitian khususnya oleh orang-orang yang memiliki beasiswa tentang sepak terjang seorang tokoh sekiranya dapat sedikit lebih terbuka dalam memberikan informasi sehingga penulisan tentang seorang tokoh dapat lebih obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Andi. 1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan*. Makassar: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
- Anonim. 2004. *Terjemahan Memori Serah Terima Jabatan di Daerah Soppeng 1927*. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Abduh, Muhammad, dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Amir, Muhammad. 2013. *Perlawanan Rakyat Ajatappareng: Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan Tahun 1905-1906*. Makassar: De La Macca
- Asyikin, Muhammad. 2013. Nasionalisme di Sulawesi Selatan 1905-1942. *Walasuji*, 4(2),4
- Indisch Militair Tijdschrift, Extra Bijlage No. 35. 1915. De Expeditie Naar Zuid Celebes 1905-1906. G Kolf & Co.
- Mattulada. 1985. *Latoa Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nonci. 2003. *Sejarah Soppeng Zaman Prasejarah – Zaman Kemerdekaan*.
- Patunru, Abdur Razak. 1989. *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
- _____. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. Makassar: Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942*. Makassar: Ombak
- Rasyid, Darwas. 2007. *Gerakan Andi Pannambong terhadap Ekspedisi Militer Belanda di Soppeng*. Makassar: BKSNT
- Sjamsuddin. Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

Sophiaan, Manai. 1996. *Perang Bone 1904-1905*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Lucardie, W.J. 1912. *De Expeditie Deer Naar Zuid Celebes Juli 1905*. Breda: De Koninklijke Militaire Academie.

Zid, Muhammad & Sjaf, Sofjan. 2009. Sejarah Perkembangan Desa Bugis-Makassar Sulawesi Selatan. *Lontar*, 6(2), 6